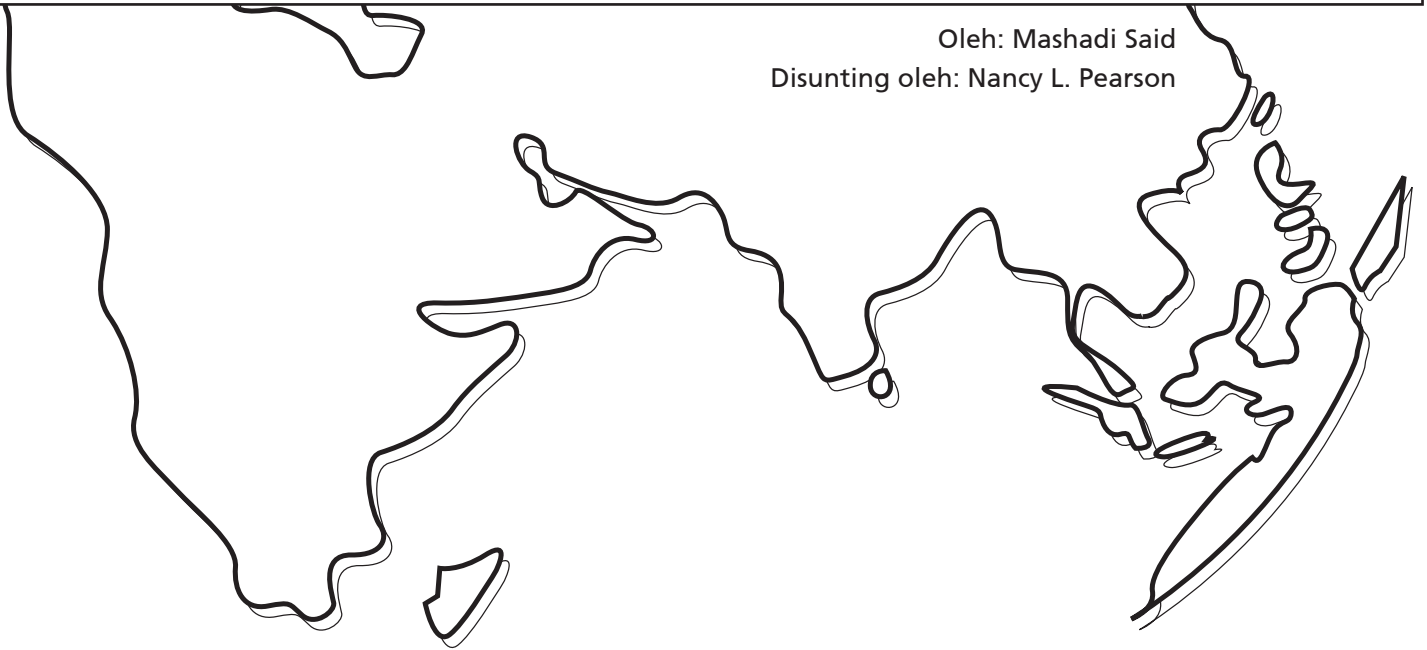


**PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI PEMANFAATAN PERSPEKTIF
AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT:**

Pemajuan Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) secara Nasional di Indonesia

Oleh: Mashadi Said

Disunting oleh: Nancy L. Pearson



Diterbitkan oleh

Pusat Korban Penganiayaan
Taktik Baru dalam Proyek HAM
717 East River Road
Minneapolis, MN 55455 USA
www.cvt.org, www.newtactics.org

Penyunting naskah

Nancy L. Pearson

Penyunting Cetakan

Nick Gardner

Rancangan

Susan Everson

Tata Letak

Jennifer Meelberg

© 2006 Pusat Korban Penganiayaan

Tulisan ini dapat diproduksi kembali secara bebas baik dalam bentuk cetak atau dalam bentuk elektronik selama label hak cipta terdapat dalam setiap cetakannya

Penegasan

Pandangan dalam tulisan ini tidak harus merefleksikan taktik-taktik baru dalam kegiatan HAM.
Proyek ini tidak mengangkat taktik atau kebijakan khusus.

4
Tentang Penulis

5
Surat dari Manajer Pelatihan Taktik Baru

6
Pendahuluan

6
Latar Belakang: Peran Kelompok Kerja (POKJA)

8
Pengembangan Taktik: Tantangan dan Aset

10
Peran Tokoh Masyarakat dan Agama dalam Masyarakat

16
Pelajaran yang Dipelajari

17
Saran Penerapan Taktik

18
Simpulan



Pusat Korban Penganiayaan
Taktik Baru dalam Proyek HAM
717 East River Road
Minneapolis, MN 55455 USA
www.cvt.org, www.newtactics.org

Tentang penulis

Mashadi Said adalah anggota Kelompok Kerja (POKJA) HAM yang bertugas mengenalkan HAM pada setiap tingkat pendidikan di seluruh Indonesia. Kepedulian dan kepeduliannya mempersiapkan generasi penerus bangsa Indonesia dan kekecewaannya melihat kasus pelanggaran HAM pada masa lalu dan saat ini di negaranya, Mashadi memutuskan bergabung dalam POKJA HAM sejak tahun 2000. Dia yakin bahwa baik pendidikan formal maupun non-formal merupakan kunci bagi setiap individu untuk memperoleh pemahaman yang pada akhirnya dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kemampuan yang dimilikinya, dalam bidang pendidikan, pada tahun 2002-2003, Mashadi memimpin kelompok sosialisasi yang memiliki tiga divisi utama, yaitu (1) penelitian dan perencanaan sosial, (2) sosialisasi pengembangan materi, dan (3) penerbitan. Mashadi juga telah menulis tiga kumpulan cerita pendek (cerpen) mengenai HAM untuk SMP dan juga buku Pengantar HAM 1, 2, dan 3 untuk siswa SMA di Indonesia.

Tentang Kelompok Kerja HAM untuk Mendiseminasikan Hak Asasi Manusia

POKJA HAM dibentuk pada tahun 2000, berdasarkan Keputusan Presiden no. 165, 2000, dan no.177, 2000 dan kerangka kerjanya berada di bawah Departemen Hukum dan HAM. POKJA merupakan kelompok penasihat untuk menyosialisasikan nilai-nilai HAM di seluruh tingkat pendidikan. Empat tugas utama kelompok ini adalah (1) mempelajari substansi berbagai jenis persoalan HAM yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM, (2) Mempersiapkan materi HAM yang berguna untuk pengenalan dan pelatihan HAM, (3) Merancang model sosialisasi dan metode diseminasi informasi HAM, dan (4) Menerbitkan hasil program sosialisasi baik di tingkat nasional maupun daerah.

Anggota POKJA terdiri atas akademisi, staf Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Departemen Kesehatan, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). POKJA (2000-2004) menyelesaikan 5 tahun masa kerja tugasnya menyiapkan kerangka nasional tentang sistem penyosialisasian HAM. Kini, Direktur Jenderal Perlindungan HAM Indonesia membentuk panitia lokal tingkat propinsi di 31 propinsi di Indonesia.

Kontak untuk informasi:

Dr. Mashadi Said
Universitas Gunadarma
Jl. Margonda Raya No. 100
Depok 16424, Indonesia

Email: mashadisaid@yahoo.com
Email: mashadi@staff.gunadarma.ac.id
Homepage: <http://staffsite.gunadarma.ac.id/mashadi/>

Ucapan Terima Kasih

Saya berterima kasih kepada The Center for Victims of Torture (Pusat Korban Penganiayaan) dan semua pihak yang telah terlibat dalam proyek ini atas usaha mereka meringkas pengalaman para aktivis LSM di seluruh dunia untuk mengenalkan nilai-nilai umum dan norma-norma HAM. Saya juga berterima kasih kepada Kepala Bagian Diseminasi HAM, Direktorat Jenderal Perlindungan HAM Republik Indonesia, Departemen Hukum dan HAM, atas kesediaannya berbagi informasi mengenai kegiatan dan hasil-hasil yang diperoleh POKJA kepada masyarakat dunia. Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada Prof. Dr. E. S. Margianti, Rektor Universitas Gunadarma, Jakarta, karena dukungannya yang tulus atas keterlibatan saya dalam pengabdian masyarakat dan kegiatan HAM baik di dalam maupun di luar Kampus.

Mei 2006

Teman-teman yang terhormat,

Selamat datang di Seri Buku Catatan Taktik Baru mengenai Hak Asasi Manusia! Di setiap buku catatan, praktisi Hak Asasi Manusia menjelaskan taktik yang berhasil dalam pemajuan Hak Asasi Manusia. Para penulis berasal dari berbagai kalangan penganjur HAM yang meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerintah, pendidik, penegak hukum, komite kebenaran dan rekonsiliasi, dan pembela hak-hak wanita dan kesehatan mental. Mereka telah mengadaptasi dan memelopori taktik-taktik yang telah berkontribusi terhadap penegakan HAM di negara mereka. Selanjutnya, taktik itu telah mereka gunakan dan dapat diadaptasi untuk diterapkan di negara lain pada situasi yang berbeda untuk menangani berbagai macam masalah.

Setiap buku catatan berisi informasi rinci tentang bagaimana penulis dan organisasinya berhasil menerapkan taktik tersebut. Kami ingin memberi inspirasi kepada praktisi HAM lain untuk berpikir secara taktis- serta memperkaya taktik mengenai pemajuan HAM secara efektif.

Buku catatan ini berisi pandangan mengenai cara Kelompok Kerja (POKJA HAM) di Indonesia mengembangkan kurikulum pendidikan HAM untuk semua tingkat umur baik di sekolah swasta maupun di sekolah negeri. Untuk mendapatkan dukungan agar kurikulum HAM dapat dilembagakan ke dalam lembaga pendidikan agama, maka taktik yang digunakan adalah melibatkan agen perubahan yang dipercaya masyarakat yang terdiri atas tokoh masyarakat dan pemuka agama serta para guru dalam pengembangan dan pelatihan kurikulum HAM. Meskipun membutuhkan waktu dan usaha dalam proses melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat, POKJA mendapat dukungan dan mengintegrasikan keinginan dan kepedulian mereka mengatasi rintangan dan tantangan mengenai pendidikan HAM. Taktik ini diharapkan dapat mengilhami orang lain yang sedang mencari dukungan pada tingkat lokal dan nasional dalam usaha penegakan HAM.

Seluruh seri buku catatan taktik ini dapat diakses di www.newtactics.org., sedangkan buku catatan tambahan telah tersedia dan akan terus bertambah untuk waktu yang akan datang. Di website kami pun Anda akan menemukan fitur-fitur lain termasuk database mengenai taktik, forum diskusi tentang para praktisi HAM dan informasi mengenai lokakarya dan simposium kami. Untuk berlangganan laporan berkala taktik baru, kirimkan e-mail ke: newtactics@cvt.org.

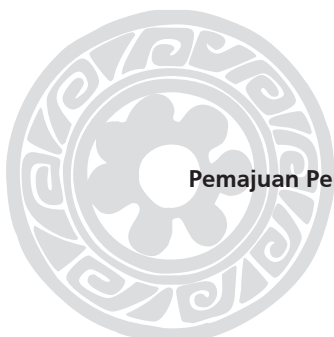
Proyek Taktik Baru HAM adalah inisiatif internasional yang didirikan oleh berbagai macam kelompok organisasi dan para praktisi dari seluruh dunia. Proyek ini dikoordinasikan oleh Center for Victims of Torture (Pusat Korban Penganiayaan). Kemudian, dari pengalaman kami muncul suatu ide sebagai pencipta taktik baru sekaligus sebagai pusat pembelaan untuk perlindungan HAM dengan posisi yang unik, yaitu sebagai tempat untuk memulihkan dan memperoleh kembali kepemimpinan sipil.

Kami berharap informasi dalam buku kecil ini dapat memberikan aspirasi untuk menemukan ide baru bagi Anda.

Salam hormat,



Nancy Pearson
Manajer Pelatihan Taktik Baru



Pendahuluan

Setelah tiga dekade di bawah pemerintahan yang refresif dan otoriter, Indonesia mulai menyadari bahwa masa transisi ke arah masyarakat yang lebih bersifat demokratis dan pluralistik membutuhkan rencana dan usaha jangka panjang. Melakukan perubahan bagi generasi mendatang, sangatlah penting membangun dan mencapai visi ini. Pada tahun 2000, pemerintah Indonesia membentuk Kelompok Kerja Nasional Pendiseminasian Hak Asasi Manusia (POKJA HAM) untuk mengimplemetasikan pendidikan HAM di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia. Pemerintah bekerjasama dengan akademisi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Departemen Pendidikan, dan Departemen Agama.

Indonesia saat ini mulai menerapkan nilai-nilai demokrasi. Tujuan kami adalah mempersiapkan generasi yang akan datang untuk menangani berbagai masalah berdasarkan nilai-nilai HAM, termasuk bagaimana menangani masyarakat usia tidak produktif, masyarakat terbelakang, serta masalah etnik agar dapat menghentikan berbagai macam kekerasan seperti yang terjadi di masa lampau. Karena itu, strategi mengatasi berbagai macam masalah berdasarkan nilai-nilai HAM perlu diciptakan. Taktik yang cukup efektif untuk membuat masyarakat sadar mengenai pentingnya mempelajari HAM adalah melibatkan agen perubahan yang terdiri atas tokoh agama serta tokoh masyarakat termasuk guru dalam pengembangan serta pelatihan pengimplemetasian kurikulum HAM di sekolah negeri dan swasta dalam semua tingkatan.

Sebagai anggota POKJA, kami bekerjasama dengan para pemilik kepentingan untuk menentukan inti kurikulum HAM yang sedang diintegrasikan ke semua tingkat pendidikan, baik di sekolah negeri, swasta, dan pendidikan non-formal.

Dengan mempertimbangkan pendapat para tokoh agama dan tokoh masyarakat, POKJA berhasil mendapatkan dukungan dan mengintegrasikan kebutuhan serta kepentingan mereka untuk memuluskan diseminasi nilai-nilai HAM ke semua jenjang pendidikan.

Hasilnya adalah nilai-nilai HAM dapat diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran, yaitu pendidikan kewarganegaraan, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan agama, geografi, dan sosiologi.

Hingga kini, sekitar 400 tokoh masyarakat termasuk tokoh agama telah mendapat pelatihan HAM oleh Direktorat Jenderal Perlindungan HAM dan sekitar 1000 guru pendidikan kewarganegaraan di sekolah negeri dan swasta telah mendapat pelatihan HAM oleh Departemen Pendidikan Nasional untuk mengin-

tegrasikan HAM ke dalam kurikulum. Juga telah dibentuk komite Panitia RAN HAM di 31 propinsi untuk memberikan pelatihan dan dukungan secara terus menerus untuk para pelatih.

Buku panduan pelaksanaan RAN HAM juga telah dikembangkan dan sesegera mungkin akan diterbitkan. Materi itu berisi nilai-nilai HAM sesuai dengan konteks budaya dan agama. Hal ini dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menghilangkan persepsi bahwa nilai-nilai HAM adalah nilai-nilai yang berasal dari Barat yang dapat merusak nilai-nilai budaya Indonesia dan agama. Walaupun sesungguhnya nilai-nilai HAM itu berisi nilai-nilai dasar kemanusiaan yang diterima secara umum.

Karena hal ini merupakan usaha baru, perubahan sikap dan perilaku tentunya memerlukan waktu seperti halnya dengan pengenalan nilai-nilai lainnya. Pengenalan nilai-nilai HAM di Indonesia menggunakan banyak agen perubahan untuk menginternalisasikan dan menyosialisasikan nilai-nilai tersebut ke seluruh bangsa Indonesia dan hasilnya baru terlihat setelah melalui waktu yang panjang. Setelah murid (tentu saja bersama orang tua dan masyarakat lainnya) dipajankan kepada mereka melalui media, tokoh masyarakat, dan tokoh agama selama beberapa tahun, diharapkan perubahan akan mulai terlihat. Yang paling sulit adalah memanfaatkan sebanyak mungkin agen perubahan. Melalui evaluasi yang dilakukan secara terus menerus, pandangan baru yang diperlukan oleh murid akan diberikan oleh guru di sekolah negeri dan swasta tempat kurikulum HAM diterapkan.

Dalam buku catatan ini saya akan menguraikan proses dan pelajaran yang kami pelajari dalam melakukan usaha besar ini, dan yang terpenting adalah bagaimana kami melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pengembangan kurikulum serta keseluruhan proses sosialisasi HAM.

SEKILAS TENTANG LATAR BELAKANG HAM: Peran Kelompok Kerja (POKJA)

Di bawah pemerintahan mantan presiden Soeharto dan setelah jatuhnya pada tahun 1998, pemerintah Indonesia memiliki catatan HAM yang sangat buruk. Menurut catatan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tahun 2004, agen-agen pemerintah terus terlibat dalam penganiayaan, dan yang paling parah adalah penganiayaan yang terjadi di daerah-daerah konflik beberapa tahun belakangan ini. Petugas keamanan telah membunuh, menyiksa, memperkosa, memukuli masyarakat sipil dan kelompok separatis, khususnya di Aceh dan sebagian kecil di Papua. Petu-

“Baru pada saat ini saya memahami makna Hak Asasi Manusia. Dulu, saya pernah berpikir bahwa HAM hanya dapat dilanggar oleh pemerintah, bukan oleh individu.”

—Guru Kewarganeraan Indonesia

“Saya sangat senang mengetahui bahwa tugas penting kita untuk meningkatkan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia diakui secara internasional.”

—Pemuka Agama



Tokoh agama yang terkenal, A.A. Gym, sedang berceramah pada ceramah rutinnya setiap minggu kepada ibu-ibu. A.A. Gym telah banyak mengangkat nilai-nilai HAM dalam ceramahnya.

gas kepolisian melakukan penyiksaan ketika menangkap para tersangka guna mendapatkan informasi atau pengakuan. Kesulitan-kesulitan lainnya yang harus terus berlanjut adalah sistem pengadilan yang korup gagal membela korban kejahatan HAM atau menahan pelaku kejahatan yang bertanggung jawab. Petugas keamanan menggunakan intimidasi dan sogokan sehingga keadilan tidak dapat dicapai. Percekcok-an mengenai masalah tanah mengakibatkan banyak kejahatan HAM

dan seringkali diikuti dengan pengusiran bahkan beberapa diselesaikan dengan tindak kekerasan.¹

Beberapa tahun belakangan, pemerintah memenjarakan beberapa orang anti-pemerintah yang memprotes karena dianggap 'menghina presiden' atau 'menyebarkan kebencian kepada negara.'² Para politisi dan gembong politik menunjukkan usaha besar-besaran guna mengambil tindakan hukum menentang pers, ketika mereka menganggap berita yang ditayangkan atau dilaporkan menghina atau menyerang, dan tindakan semacam ini merupakan cara untuk meredakan atau menghambat laporan-laporan investigasi. Beberapa anggota keamanan dan kelompok lain kadang-kadang membatasi kebebasan berekspresi dengan mengintimidasi dan menyerang wartawan ketika mereka menganggap berita yang ditulis tidak objektif. Pemerintah pun dalam beberapa kesempatan membatasi peliputan wartawan asing ke daerah konflik seperti Aceh, Papua, Sulawesi, dan Maluku (2002-2003).³

Secara umum, ketika diskriminasi dan penganiayaan oleh kelompok agama tertentu dan orang-orang yang berkuasa terjadi, pihak yang berwenang mengabaikan tindakan mereka atau tidak berbuat sesuatu untuk menghalangi mereka bertindak demikian. Contoh, kelompok Islam beraliran ekstrim menyerang klub malam (secara nyata menghukum pemiliknya karena dianggap menoleransi atau mempromosikan perbuatan asusila) atau seperti meningkatnya penyerangan ke aliran kecil Islam yang dikenal dengan Ahmadiyah.⁴ Pemerintah telah membatasi aktivitas lembaga swadaya masyarakat (LSM) terutama di Aceh dan Papua. Wanita telah menjadi korban kekerasan dan diskriminasi seperti mutilasi terhadap wanita yang dipraktikkan di beberapa daerah. Anak-anak korban kekerasan dan pelecehan seksual, demikian pula pe-

kerja anak-anak masih menjadi masalah yang serius. Penjualan anak dan perempuan masih menjadi topik hangat sekarang ini, selain masalah diskriminasi terhadap golongan lemah dan perlakuan yang tidak adil terhadap masyarakat adat. Pemerintah mengizinkan pembentukan serikat buruh gagal memperbaiki standar gaji buruh atau membela atau melindungi hak-hak pekerja.

Bentuk diskriminasi dan korupsi yang "melembaga" ditemukan di Indonesia. Orang Indonesia keturunan Cina tidak bisa bekerja sebagai pegawai negeri sipil ketika masa pemerintahan Soeharto. Selanjutnya, pada tahun 1995, para pegawai negeri, termasuk dosen, profesor, dan rektor, diharuskan menjadi anggota partai pemerintah (GOLKAR) dan harus menyertakan kartu keanggotaan bila ingin mengajukan kenaikan pangkat/jabatan. Bentuk diskriminasi yang menyakitkan ini memberikan dampak yang amat besar pada banyak orang. Namun, situasi seperti ini telah berkurang sekarang ini.

Pemerintahan Indonesia sekarang melakukan gerakan melalui berbagai macam institusi seperti Komisi Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden (No.50/1993). Keputusan itu diikuti dengan pengesahan Komisi Anti Penganiayaan Terhadap Wanita (keputusan pemerintah No. 181, 15 Oktober 1998), dan pembentukan menteri HAM (1999) yang akhirnya diubah menjadi Direktorat Jenderal Perlindungan HAM dalam naungan Departemen Hukum dan HAM. Pada tahun 1999, Undang-Undang HAM No. 39 diterapkan, diikuti Undang-Undang pengadilan HAM No. 26 pada tahun 2000. Undang-Undang lain mengenai HAM juga dimuat dalam amandemen Undang Undang Dasar 1945. Akhirnya, keputusan presiden tahun 1998 No. 129 yang terdapat dalam Gerakan Rencana Nasional HAM di Indonesia direvisi melalui keputusan presiden No. 61 tahun 2003.

Penting untuk dicatat bahwa keruntuhan pemerintahan Soeharto menyuburkan tumbuhnya banyak partai berbasis agama dan munculnya tokoh-tokoh yang sebelumnya hanya duduk di posisi kedua dalam pemerintahannya. Agama kini memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, pengenalan nilai-nilai HAM harus memperhatikan ajaran agama dan kebudayaan yang terdapat di Indonesia. Pada saat yang sama, persepsi mengenai HAM di masyarakat umum harus dicermati. Sejumlah langkah pengembangan HAM yang dilakukan dan sosialisasinya dianggap hanya untuk memperkaya diri para penganjur HAM karena banyaknya dana yang tersedia untuk itu.

Dalam pengamatan kami, keinginan yang meningkat di kalangan warga, khususnya kaum mayoritas muslim dan minoritas, untuk melaksanakan dan mengintegrasikan nilai-nilai agama mereka ke dalam kehidupan

mereka, maka nilai-nilai agama harus diperhatikan dalam proses pendidikan HAM. Akhirnya, karena semakin kuatnya pengaruh tokoh agama dalam kehidupan masyarakat, maka taktik yang diterapkan di sini untuk mengenalkan nilai-nilai HAM dalam pendidikan sangat tepat.

Rencana Aksi HAM Nasional (2004-2009) dimaksudkan sebagai panduan dan rencana umum untuk meningkatkan penghormatan, pemenuhan, serta perlindungan HAM termasuk di dalamnya perlindungan bagi kelompok masyarakat rentan terhadap kejahatan HAM. Rencana tersebut sesuai dengan Undang-undang nasional HAM, pengenalan sadar hukum, dan pemberantasan kemiskinan yang telah mendapatkan perhatian khusus dalam pembangunan. Program utamanya dibagi menjadi 6 bagian:

- Membentuk dan memperkuat lembaga RAN HAM secara nasional;
- Mempersiapkan ratifikasi instrumen internasional tentang HAM;
- Mendiseminasikan dan mengajarkan HAM;
- Menerapkan standar dan norma HAM;
- Memonitor, mengevaluasi, dan melaporkan.

Usaha yang kami lakukan di POKJA khususnya diarahkan pada "Pendiseminasian dan pendidikan HAM" untuk mencapai tujuan sosialisasi. Pada tahun 2000, pemerintah Indonesia telah memberi mandat kepada Direktur Jenderal HAM untuk memajukan, mengimplementasikan, dan menyosialisasikan nilai-nilai HAM melalui pendidikan formal maupun non-formal untuk generasi mendatang.⁵ Tujuan POKJA yang dibantu oleh Dirjen HAM mengembangkan rencana untuk menyebarluaskan HAM melalui sistem pendidikan ke seluruh Indonesia. Untuk melaksanakan mandat ini POKJA yakin bahwa keterlibatan tokoh agama dan masyarakat merupakan cara yang terbaik untuk memperkuat dukungan penuh dari masyarakat. Hasil yang diharapkan adalah menyiapkan siswa di seluruh sistem pendidikan melalui kurikulum dan buku ajar mengenai HAM serta meningkatkan nilai-nilai tersebut dalam diri siswa.

PENGEMBANGAN TAKTIK: Tantangan dan Aset

Untuk mencapai tujuannya, POKJA melakukan sejumlah langkah-langkah untuk melakukan konsultasi dan melibatkan pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam pengembangan kurikulum. POKJA, melalui diskusi intensif, berhasil membangun dan mengorganisasikan respon mereka ke dalam strategi umum pemerintah untuk memperkenalkan HAM kepada seluruh masyarakat Indonesia:

- Menciptakan kesadaran dan melibatkan dukungan tokoh masyarakat dan agama memahami relevansi pengenalan HAM.

- Memperoleh masukan dari tokoh masyarakat dan agama dalam pengembangan kurikulum HAM.
- Melatih tokoh masyarakat dan agama untuk melatih teman sejawat dan guru-guru.
- Membantu membentuk jaringan kerja secara nasional untuk memungkinkan para tokoh agama dan masyarakat membagi pengalaman kepada orang lain serta menyiapkan dukungan secara terus menerus.
- Memanfaatkan sistem pendidikan yang terpusat untuk mendiseminasikan kurikulum yang akan dilaksanakan pada pendidikan formal dan non formal dengan dukungan tokoh agama dan masyarakat.

Dukungan tokoh masyarakat dan agama untuk memahami relevansi pengenalan nilai-nilai HAM

Salah satu tantangan berat adalah anggapan masyarakat dan para tokoh bahwa nilai-nilai HAM adalah nilai impor dari Barat. Karena nilai-nilai HAM resmi diterima dan digunakan pada tahun 1999 oleh pemerintah, maka tugas selanjutnya adalah menyosialisasikan nilai-nilai ini ke berbagai kalangan masyarakat dengan cara yang dapat diterima sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama.

Salah satu aset positif adalah sistem pendidikan yang tersentralisasi. Semua lembaga pendidikan termasuk swasta diharuskan mengintegrasikan kurikulum nasional dalam sistem pendidikannya. Hal ini membuat sistem pendidikan menjadi tempat yang efektif mengenalkan nilai-nilai hak-hak asasi manusia.

Untuk menghindari anggapan mengenai nilai-nilai impor dari Barat tersebut, POKJA mengangkat nilai-nilai HAM yang terdapat dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM. POKJA menyimpulkan bahwa opini tokoh masyarakat termasuk tokoh agama merupakan kunci suksesnya pengenalan nilai-nilai HAM melalui pendidikan formal dan non formal. Namun, mereka perlu memiliki pengetahuan yang lebih dalam mengenai HAM sebagai mediasi dalam proses penyosialisasian nilai-nilai HAM tersebut.

POKJA mengidentifikasi pemahaman yang lebih luas di antara tokoh masyarakat mengenai nilai-nilai HAM khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam. POKJA membutuhkan untuk mencapai keseimbangan antara mempromosikan nilai-nilai HAM dan mempromosikan nilai-nilai Islam tanpa lebih banyak menyebutkan istilah HAM. Kami perlu menjawab satu pertanyaan penting: "Apakah kurikulum yang akan merujuk pada nilai-nilai HAM secara terpisah atau tidak?" Akhirnya kami menggabungkan kedua nilai-nilai itu dengan menggunakan bahasa HAM dan

bahasa agama. Tantangan lain adalah bagaimana merangkul dan melatih tokoh masyarakat dan agama serta ribuan guru di seluruh Indonesia termasuk guru agama, sosiologi, kewarganegaraan dan geografi untuk mengajarkan nilai-nilai ini. Akhirnya, tugas ini menjadi tugas utama panitia lokal yang telah dibentuk untuk tujuan ini dan untuk menyiapkan dukungan penuh bagi proses pendidikan dan penyosialisasian HAM. Hal ini kemudian akan dibicarakan dalam buku catatan ini.

Banyak tokoh masyarakat setelah menerima undangan POKJA untuk berpartisipasi dalam proses pengenalan HAM berusaha menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam lebih komprehensif daripada nilai-nilai HAM. Awalnya mereka tidak mengerti maksud pemerintah untuk menekankan, mengangkat dan mengimplemetasikan nilai-nilai HAM. Pada awalnya mereka ingin berdebat tentang relevansi pengenalan nilai-nilai HAM di Indonesia karena mereka percaya bahwa nilai-nilai ini diimpor dari Barat. Akhirnya mereka mau menerima alasan kami mengundang mereka.

Taktik ini bisa dikembangkan karena tokoh masyarakat dan agama di Indonesia merupakan agen perubahan yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Mereka memiliki dan mengelola sekolah, rumah sakit dan lembaga lain, dan karena pendapat mereka diikuti oleh masyarakat. Para tokoh ini berpengaruh di masyarakat. Bantuan mereka diperlukan untuk menjamin keberhasilan integrasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

Meninjau kembali filosofi tradisional dan Islam, penyebaran melalui tokoh masyarakat telah membantu membuat nilai-nilai HAM cocok bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan menyediakan contoh-contoh fi-

Beberapa persepsi yang sulit dihadapi oleh POKJA HAM.

- “Sebenarnya, Islam lebih universal [daripada nilai-nilai hak asasi manusia].”
- Apabila Islam dapat diimplementasikan dengan baik, tidak akan ada orang yang melanggar hak-hak orang lain. Karena itu, berbicara mengenai hak-hak asasi manusia tidaklah relevan.”

losofi tradisional dan Islam, kami mampu memasukkan contoh filosofi ini dalam program pendidikan HAM. Orang lain mungkin memandang tradisi agama dan budaya mereka sendiri untuk membantunya membingkai HAM atas dasar budaya dan cara yang dapat diterima. Nilai-nilai budaya Indonesia yang mempermudah pengenalan nilai-nilai HAM meliputi solidaritas, persaudaraan, saling menghargai, kebebasan.

Kami menyadari kondisi ini sebagai hal khusus bagi Indonesia selama Indonesia terdiri atas mayoritas Muslim. Apalagi budaya tradisional sering digunakan oleh tokoh agama sebagai media sosialisasi Islam. Namun, taktik ini lebih membantu bagi penganjur HAM yang bekerja pada lingkungan dengan populasi muslim yang lebih besar, seperti Pakistan, Banglades, Malaysia, dan Filipina. Hal ini dapat digunakan juga untuk konteks yang lain untuk mendapatkan dukungan tokoh masyarakat guna memanfaatkan nilai-nilai dan filosofi tradisional untuk mempromosikan nilai-nilai HAM.

Secara khusus, POKJA mengidentifikasi sejumlah potensi pendukung dan penantang dalam program sosialisasi. Pendukung meliputi tokoh masyarakat dan agama yang bekerja pada Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Di antara penantang meliputi beberapa tokoh muslim termasuk guru agama yang tidak percaya bahwa nilai-nilai HAM perlu diajarkan secara khusus. Satu hal

yang sulit dihadapi oleh POKJA adalah kepercayaan dan persepsi bahwa Al-Qur’an telah mencakup seluruh nilai-nilai HAM yang diperlukan. Saya harus menekankan sekali lagi bahwa umumnya masyarakat menganggap bahwa nilai-nilai HAM merupakan nilai-nilai impor dari Barat. Pada awal diadakannya lokakarya, beberapa tokoh agama mengejek bahwa tidak ada hal baru dalam HAM karena semuanya

Tabel 1
Contoh perbandingan filosofi yang ditemukan di Indonesia dan yang relevan dengan HAM dalam kurikulum agama: Islam dan Kristen

Agama	Konsep HAM	Kompetensi Dasar	Indikator
ISLAM	Menghargai orang yang berbeda pendapat, agama, ras, jenis kelamin, dan harta benda	Membaca dan mengerti toleransi yang dimaksudkan dalam Al-Quran.	Membaca Al-Quran dengan benar yang mengacu pada dua versi 40-41. Mengerti isi maksud toleransi terhadap pendapat, agama, ras, umur, harta benda, dan jenis kelamin. Mengadopsi sikap toleran.
KRISTEN	Menghargai orang yang berbeda pendapat, agama, ras, jenis kelamin, dan kekayaan/harta.	Menjelaskan makna kebersamaan dengan orang lain yang berbeda pendapat, agama, ras, kekayaan yang berbeda tanpa menghilangkan identitas kristiani.	Mengadopsi identitas sebagai pengikut kristiani dengan menghormati orang lain yang berbeda kepercayaan. Memiliki rasa simpati dan empati kepada orang lain. Mengadopsi kelakuan kristus agar hidup secara “benar” dan hidup dalam lingkungan yang bersahabat dan damai.

telah ada dalam Islam. Beberapa tokoh muslim termasuk guru agama belum mau menerima nilai-nilai HAM itu sendiri karena mereka menilai bahwa nilai-nilai itu lebih rendah statusnya dibandingkan dengan nilai-nilai dalam Al-Qur'an. Apalagi, nilai-nilai HAM dibuat oleh manusia sementara nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an merupakan buatan Tuhan.

Pada saat yang sama, tidak ada hambatan khusus untuk mendatangkan para tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam lokakarya tersebut. Perlu diketahui bahwa terdapat berbagai kategori tokoh muslim, dari aliran tradisional (yang membaca kitab kuning, atau interpretasi Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad sebelum abad ke-10) sampai pada intelektual muslim yang berpendidikan tinggi. Tokoh muslim tradisional lebih tertutup terhadap konsep-konsep baru dan interpretasi Al-Qur'an, sedangkan golongan kedua lebih terbuka. Namun, semua menerima undangan itu karena atas perintah atasan mereka dan dukungan POKJA, sehingga mereka dapat mengikuti pelatihan. Tetapi, mereka masih tetap percaya bahwa nilai-nilai HAM lebih rendah daripada nilai-nilai Islam. Kami memperhatikan kritikan mereka dan berusaha meyakinkan mereka dengan cara merujuk ke terminologi Islam secara eksplisit dan nilai-nilai Islam yang secara nyata mendukung konsep HAM.

Memperoleh masukan dari tokoh masyarakat dan agama dalam pengembangan kurikulum HAM

Kami memandang bahwa tokoh masyarakat di Indonesia meliputi tokoh formal dan non formal. Tokoh formal terdiri atas orang-orang yang bekerja di sektor pemerintah mulai dari pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan, dan tingkat desa. Mereka bertugas dalam pembangunan dan mendistribusikan keuangan dari pemerintah pusat, walaupun telah terjadi beberapa perubahan dalam usaha ke arah desentralisasi. Orang-orang ini umumnya dihargai dan disegani oleh masyarakat. Dengan kedudukan ini mereka tentunya didengarkan bagi implementasi proyek-proyek pemerintah.

Tokoh informal meliputi guru, mereka yang berpendidikan, individu-individu yang kharismatik di tingkat desa, dan pemimpin berbagai kelompok etnis, agama (ulama), para pensiunan, kelompok bela diri, tabib, dan pegawai pemerintah lainnya. Mereka pada umumnya dianggap sebagai "tokoh informal" yang aktif dalam lembaga kemasyarakatan, pembela hak-hak wanita, apakah dia sebagai anggota aktif atau para pemimpin.

"HAM relevan dengan Islam [...] Filosofi dasar HAM berdasarkan suatu premis bahwa semua manusia sama, diakui dalam Islam sebagai ajaran yang sangat penting, tidak ada seorang pun yang lebih baik dari yang lain baik berdasarkan kewarganegaraan, ras, keturunan, warna kulit, jenis kelamin, kekayaan maupun status. Semua orang sama tanpa memandang statusnya."

—Tokoh masyarakat

POKJA menyadari bahwa tokoh agama membutuhkan perhatian khusus dan memiliki peran yang bervariasi. Mereka adalah guru dari berbagai latar belakang. Kyai⁶ atau ulama⁷ dididik di pesantren⁸ dan membaca kitab-kitab kuning. Sebagian ulama menyelesaikan pendidikannya dari lembaga modern, dan ilmuwan ini berkhotbah di masjid-masjid dan kelompok pengajian. Tokoh agama juga memimpin gereja dan kuil. Selanjutnya, tokoh agama memimpin kelompok diskusi agama dan organisasi agama, dan telah menjadi teladan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

PERAN TOKOH MASYARAKAT DAN AGAMA DALAM MASYARAKAT

Sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat mereka dihargai dan dipercaya oleh masyarakat pada umumnya. POKJA merasa bahwa keterlibatan mereka sangat penting dalam program sosialisasi HAM dan POKJA berkonsentrasi tentang bagaimana memberi informasi dan membina mereka mengenai nilai-nilai HAM.

Selanjutnya, agama terintegrasi ke dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia dan umumnya aktivitas sosial melibatkan da'i sebagai agen perubahan dalam pengembangan masyarakat. Peran agen ini amat penting untuk menyebarluaskan pemahaman baru tentang agama dalam kaitannya dengan modernisasi dan pembangunan termasuk pemahaman dan implementasi nilai-nilai HAM.

Pentingnya kedudukan tokoh masyarakat dan agama dapat dilihat dengan keterlibatan mereka dalam pencegahan dan penyelesaian konflik. Mereka dihargai baik di kalangan masyarakatnya dan pemerintah dan diminta secara khusus untuk membantu menyelesaikan konflik di Ambon, Poso, dan Kalimantan.⁹

POKJA juga menggunakan kemampuan tokoh-tokoh ini untuk menggerakkan orang-orang karena keberhasilan mereka memperkenalkan dan memajukan Program Keluarga Berencana di Indonesia pada tahun 1980 an dan 1990an. Dengan demikian, taktik yang sama digunakan untuk memperkenalkan HAM. [Lihat Tabel: "Pelajaran yang dipelajari dari masa lampau dimana tokoh agama sebagai mediasi bagi Program Keluarga Berencana."]

Perlu juga dikemukakan di sini mengapa tokoh agama dan tokoh masyarakat ikut dalam usaha POKJA. Menurut tradisi, seseorang tidak etis menolak undangan dari pemerintah. Juga, menerima undangan dari pemerin-

tah dapat berdampak positif bagi dirinya di kemudian hari. Terpilih sebagai salah seorang yang mewakili organisasi merupakan kehormatan. Selanjutnya, dengan bantuan Dirjen Perlindungan HAM, mereka disediakan dana transportasi, akomodasi hotel selama 3 hari, dan insentif kecil (Rp. 250.000 atau setara dengan 25 USD) atas partisipasi mereka.

LANGKAH-LANGKAH DALAM UNDANGAN, KONSULTASI DAN PROSES PELATIHAN (LIHAT JADWAL PADA TABEL 2)

Untuk mengundang tokoh masyarakat, POKJA terlibat dalam proses yang cukup panjang. POKJA mengidentifikasi organisasi sosial kemasyarakatan yang terkemuka. Dua organisasi muslim yang terkemuka memiliki fasilitas pendidikan, klinik, rumah sakit, dan panti asuhan, dan mengorganisasi pelatihan secara reguler dan kegiatan lain-

Tabel 2: Jadwal Proses Diseminasi HAM

No.	Waktu	Agenda
1	Agustus 2001	Pembentukan POKJA
2	September 2001	Undangan konsultasi
3	Oktober-November 2001	Konsultasi
4	November 13,14 2001	Lokakarya: Pengembangan kurikulum (tahap 1)
5	Januari 10, 12, 2002	Lokakarya: Pengembangan kurikulum (tahap 2)
6	Oktober 21,22, 2002	Lokakarya: Penulisan buku ajar (tahap 1)
7	Juni, 2003	Survei analisis kebutuhan pendidikan HAM di Universitas
8	Agustus-November, 2003	Lokakarya: Penulisan buku ajar (tahap 2)
9	Juli, 14-15, 2004	Lokakarya: Pengembangan kurikulum tingkat universitas
10	Juli, 19-21, 2004	Umpan balik dari guru agama: guru menyarankan pelatihan
11	Agustus 2001 sampai saat ini	TOT

PELAJARAN YANG DIPELAJARI DARI MASA LAMPAU DARI TOKOH AGAMA SEBAGAI MEDIASI PADA PROGRAM KELUARGA BERENCANA

Untuk menjamin bahwa program keluarga berencana yang dipelopori oleh pemerintah berhasil, pemerintah pertama-tama menamakannya program keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga dengan penekanan utama pada kesejahteraan. Kemudian tokoh agama ditugaskan oleh negara untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai program keluarga berencana. Tokoh agama menganjurkan agar orang tua mempersiapkan anak-anak mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik serta menghargai hak-hak wanita dan anak-anak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik berdasarkan Al-qur'an. Keterlibatan tokoh agama pertama-tama dipandang oleh tokoh agama lainnya sebagai bagian dari propaganda barat untuk mengurangi jumlah umat islam di dunia. Namun, karena kemampuan beberapa tokoh agama yang terlibat dalam proses sosialisasi keluarga berencana mampu menjadikan Al-qur'an sebagai referensinya, para tokoh lainnya ikut serta. Sebenarnya, banyak orang Indonesia pada awalnya menolak konsep ini karena kurangnya pemahaman mereka. Namun, ketika didasarkan pada agama dan budaya, masyarakat dapat menerimanya dengan baik.

nya. Kegiatan ini mempengaruhi kehidupan muslim, muslimat, dan anak-anak di Indonesia. Di antara organisasi terkemuka ini, 40 orang diundang. Mereka diminta untuk mengirim utusan yang dapat berkontribusi dalam lokakarya dan menyumbangkan idenya. Semua organisasi yang diundang mengirim utusannya. Bersama dengan utusan ini, POKJA membicarakan dan setuju untuk memasukkan nilai-nilai HAM ke dalam kurikulum pendidikan. Dengan menunjukkan minat dan perhatian untuk memasukkan nilai-nilai HAM ke dalam kurikulum agama pada khususnya, POKJA menjelaskan nilai-nilai ini dan perlunya menciptakan kesamaan standar antara Indonesia dengan dunia pada umumnya. Sesungguhnya, dengan memasuki proses demokratisasi, Indonesia saat ini sedang mengikuti masyarakat dunia dan menarik untuk dilihat bahwa kita semua, termasuk muslim Indonesia, berbagi nilai, yang kita pilih dengan nama nilai-nilai HAM. Juga didiskusikan relevansi HAM dengan nilai-nilai Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha, yang kenyataannya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam tradisi keagamaannya dan kitab sucinya. Terakhir, POKJA mengundang guru agama (SD, SMP, SMA, dan dosen, yang juga sering memimpin kelompok diskusi agama) untuk berpartisipasi dalam fase penyosialisasian HAM.

POKJA mengintegrasikan pertanyaan-pertanyaan, kepentingan-kepentingan, dan ide-ide ke dalam kurikulum baru. Dengan cara ini tokoh masyarakat berkontribusi terhadap pengintegrasian nilai-nilai HAM ke dalam kurikulum kewarganegaraan mata pelajaran etika, yang merupakan mata pelajaran wajib di semua tingkat pendidikan baik negeri maupun swasta. POKJA telah menerbitkan buku kumpulan cerita HAM yang dapat digunakan di SD dan SMP, baik negeri maupun swasta.

Langkah selanjutnya, POKJA meminta pendapat guru termasuk guru agama (Islam dan Kristen) untuk melihat relevansi konsep HAM yang ada dalam kurikulum berdasarkan agama mereka. Karena DIRJEN HAM bekerja sama dengan Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Agama dan Pemerintah Daerah (pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam era otonomi), maka melibatkan guru dalam proses sosialisasi HAM tidaklah sulit. Para guru senior diundang oleh pemerintah untuk berpartisipasi dalam lokakarya. Guru-guru ini merasa senang dan terhormat karena dilibatkan dalam proses. Dan, transportasi lokal disiapkan.

Komentar dan saran guru dipertimbangkan untuk menyesuaikan kebutuhan mereka guna revisi kurikulum pada tahun 2006. Di antara saran mereka adalah menyiapkan pelatihan kepada semua guru-guru tanpa memandang agama mereka. Terakhir, POKJA mendapatkan kontribusi para tokoh ini untuk merumuskan buku panduan yang akan digunakan oleh pelatih HAM pada sektor non formal.

MELATIH TOKOH MASYARAKAT DAN AGAMA UNTUK MELATIH REKAN SEJAWAT DAN GURU

Sejak tahun 1999, pemerintah telah mencanangkan program aksi yang lebih luas melalui pelatihan HAM kepada anggota dewan, dan para eksekutif. Selanjutnya untuk menyebarluaskan nilai-nilai HAM ditempuh melalui sistem pendidikan yang bersifat sentralistik dan melakukan pelatihan terhadap penganjur HAM baik di luar negeri maupun dalam negeri di bawah koordinasi departemen hukum dan HAM, dan departemen yang terkait.

Pada fase implementasi, tokoh masyarakat dilatih tentang nilai-nilai HAM. Para peserta terdiri atas guru-guru dari SD sampai ke universitas, negeri maupun swasta, dan tokoh masyarakat adat dan minoritas, termasuk kelompok pengajian, organisasi wanita dan non pemerintah.

Kenyataannya, salah satu insentif yang digunakan untuk melibatkan para tokoh masyarakat adalah mengirim mereka ke luar negeri (Australia, Afrika Selatan, Swedia, dan Norwegia). Yang lain dilatih dalam negeri. Mereka yang ke luar negeri melihat hal-hal yang dilakukan di sana tentang HAM dan setelah mereka pulang ke tanah air, mereka menjadi pelatih. Mereka menghadiri temuan dengan tokoh-tokoh dari negara lain, sehingga mereka memperoleh informasi dan wawasan tambahan. Mereka dapat melihat diri mereka sebagai warga dunia, dalam konteks internasional yang lebih luas.

Pengalaman ini juga membantu mereka memahami motivasi awal pemerintah Indonesia untuk menyebarluaskan nilai-nilai HAM. Setelah mereka dilatih, mereka diharapkan menjadi pelatih. Mereka juga termasuk dalam suatu jaringan kerja yang memungkinkan mereka mendapatkan dukungan dalam melatih individu pada lingkungan mereka masing-masing. Jaringan kerja ini memungkinkan mereka untuk membandingkan kemajuan usaha pelatihan mereka dalam pelatihan HAM terhadap guru-guru, polisi, dan tokoh masyarakat lainnya.

Walaupun POKJA tidak terlibat langsung dalam pelatihan yang bersifat internasional, berikut ini contoh pelatihan yang dilakukan di luar negeri dan di Indonesia.

Musda Mulia, tokoh agama yang bekerja sebagai peneliti utama di LIPI, dipilih karena dia telah menunjukkan pengaruhnya terhadap organisasi wanita. Dia juga pemimpin di Nahdatul Ulama (NU), salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dia juga istri direktur bidang keuangan program pasca sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Dia telah menerbitkan buku dari hasil penelitiannya tentang masalah hak-hak wanita dan berbicara dalam berbagai forum, seminar, dan lokakarya.

Pada tahun 2002, ia mengikuti TOT selama tiga minggu di Swedia. Bersama dengan 40 orang tokoh Indonesia lainnya, Musda Mulia mendapatkan pelatihan mengenai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; UU No. 39 tahun 1999 tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; Islam dan Hak Asasi Manusia; Golongan Minoritas; Relevansi Kebudayaan Indonesia dan Hak Asasi Manusia; Strategi sosialisasi Hak Asasi Manusia; Universalisme dan Relativisme. Pelatihan ini dipersiapkan untuk para ahli Indonesia dan mendapatkan pelatihan di luar negeri, umumnya di Swedia dan Kanada.

Setelah pelatihan, Musda bergabung di Kelompok Kerja Nasional (POKJA). Ia mengintegrasikan gagasan hak asasi manusia pada ceramah-ceramahnya di majelis taklim NU dan di seminar-seminar lainnya. Ia telah menerbitkan sebuah buku yang sangat populer mengenai kesetaraan jender, termasuk pembahasan mengenai poligami menurut Islam. Buku ini digambarkan sebagai suatu kemajuan penting oleh harian The Jakarta Post. Tokoh religius ini juga adalah pelatih di Departemen Hukum dan HAM.

Tokoh religius lainnya adalah Anisa Basleman. Dia telah mendapatkan pelatihan yang serupa di luar negeri. Seorang profesor wanita dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang juga sering berceramah dalam majelis taklim, khususnya di Muhammadiyah, dan organisasi sosial-keagamaan nasional lainnya. Pada tahun 2002, ia mengikuti pelatihan selama sebulan di Norwegia bersama dengan 20 orang tokoh Indonesia lainnya. Topik-topik yang diikutinya antara

“Sesungguhnya Islam mengakui nilai-nilai ini [nilai-nilai HAM].”

-Tokoh Agama



Mashadi di tengah-tengah guru sekolah menengah memimpin kelompok diskusi Pengembangan Kurikulum untuk Sekolah Menengah (SMP & SMA). November 2001.

lain: Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; CEDAW; RCCPR); Universalisme dan Relativisme; Mekanisme Hak Asasi Manusia Sedunia; Sejarah Hak Asasi Manusia.

Seperti halnya Musda Mulia, pelatihan di luar negeri ini membuat Profesor Basleman memperoleh pandangan yang berbeda tentang Hak Asasi Manusia dari para pelatihnya. Ditambah lagi, seluruh peserta pelatihan dapat bertukar pandangan dengan para

staf mengenai sistem peradilan Hak Asasi Manusia, termasuk Mahkamah Agung dan juga mengunjungi penjara dan para tahanan setempat.

Sekembalinya ke tanah air, Profesor Basleman mengintegrasikan pengetahuannya ke dalam diskusi-diskusi yang dia adakan terhadap kelompok ibu-ibu. Ia mendirikan Pusat Studi HAM di Universitas Negeri Jakarta. Lembaga ini mengadakan penelitian dan pelatihan mengenai hak asasi manusia untuk pegawai negeri setempat dan organisasi-organisasi non-pemerintah. Selain itu badan ini juga mengadakan pelatihan bagi para guru sekolah dasar sampai menengah yang diutus oleh pemerintah. Prof. Basleman kini terlibat dalam pengembangan kurikulum hak asasi manusia pada tingkat universitas.

Tokoh masyarakat Indonesia lainnya juga mengikuti pelatihan di luar negeri bersama dengan para tokoh dari berbagai negara lain, sehingga memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai HAM di berbagai negara. Natsir Zubaidi, tokoh MUI (Majelis Ulama Indonesia) mendapatkan pelatihan di Jakarta pada tahun 2001. Ia dipilih berdasarkan peranannya yang besar dalam majelis ini. Ia mengajar di Universitas Hamka, bagian dari Universitas Muhammadiyah. Ia juga sering berbicara di berbagai pertemuan sosial-keagamaan. Pelatihan yang diperoleh Natsir meliputi: Islam dan Hak Asasi Manusia, Deklarasi Universal ten-

Tabel 3

KURIKULUM HAM:

Proses Implementasi melalui Sistem Pendidikan di Indonesia

Dirjen HAM, Departemen Hukum dan HAM, POKJA Desiminasi HAM (Akademisi, Komite HAM, Departemen Pendidikan, Departemen Agama)

Pemajuan HAM meliputi:

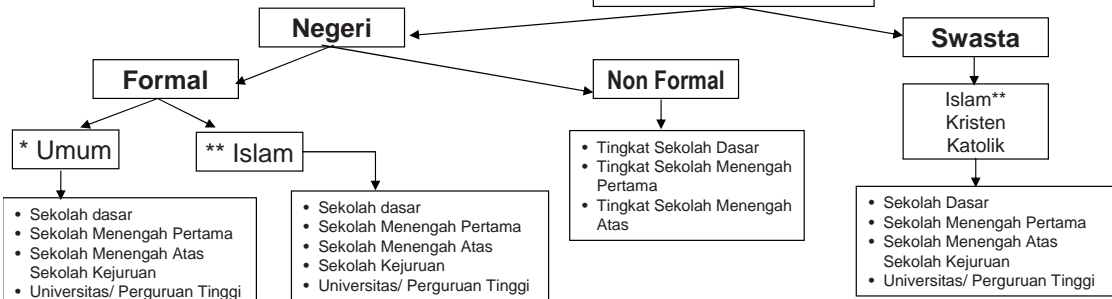
Departemen Pendidikan, Departemen agama bekerja sama dengan Tokoh masyarakat

Pendidikan

Tokoh masyarakat:
Formal dan non formal, pemuka agama, kelompok etnis, pendidik, peneliti, tokoh dari departemen agama dan pendidikan, pimpinan dalam lingkungan departemen pendidikan dan agama, serta hukum dan HAM

Kurikulum: (SD: Ilmu Sosial, Agama; SMP: Kewarganegaraan, Agama; SMA: Agama, Geografi, Sosiologi; Universitas: Kewarganegaraan, HAM)
Guru: (SD: Ilmu Sosial, Agama; SMP: Kewarganegaraan, Agama; SMA: Agama, Geografi, Sosiologi);
Buku Teks

Sistem Pendidikan



Catatan:

* Sistem pendidikan negeri di Indonesia mengajarkan 5 agama yang diakui meliputi: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha
** Pada sektor negeri maupun swasta ada sekolah dan universitas mengadopsi pendekatan Islam dalam belajar pada dasarnya topik yang menjadi bahasan dalam lembaga ini meliputi: filsafat Islam dan ilmu-ilmu sosial.

Catatan Singkatan:

HAM: Hak Asasi Manusia; SD: Sekolah Dasar; SMP: Sekolah Menengah Pertama; SMA: Sekolah Menengah Atas

tang Hak Asasi Manusia, UU Hak Asasi Manusia No. 39, 1999; Hak-hak Sosial, Kebudayaan dan Ekonomi, Diskriminasi, Universalisme dan Relativisme, Kebudayaan Indonesia dan Hak Asasi Manusia, Sejarah Hak Asasi manusia, Instrumen Internasional dan Nasional Hak asasi Manusia, CEDAW, RCCPR. Setelah pelatihan, Natsir bergabung di POKJA untuk memajukan pendidikan hak asasi manusia.

Contoh terakhir tokoh yang mengikuti pelatihan hak asasi manusia adalah Afdal Mangkuraga, perwakilan dari Habibie Center. Ia mendapatkan pelatihan di Sidney, Australia pada tahun 2003 bersama dengan 18 orang Indonesia lainnya.

Habibie Center dikenal sebagai badan penyelenggara seminar dan pelatihan hak asasi manusia. Afdal juga mengajar di universitas swasta di Jakarta, yaitu Universitas Mercu Buana.

Tambahan lagi, POKJA juga perlu melatih orang-orang yang memiliki peran dalam pengembangan kurikulum dan buku ajar karena keduanya akan selalu dijadikan sebagai pedoman. Tentu saja, pengembangan kurikulum dan penulisan buku ajar dibimbing oleh pakar pendidikan dari lembaga pendidikan yang sekarang menjadi Universitas Negeri di Jakarta. Para penulis terdiri dari akademisi dan guru (termasuk guru agama) yang telah terlatih. POKJA memberikan penyuluhan dan supervisi.

Membantu dalam pembentukan jaringan nasional yang memungkinkan mereka berkonsultasi dan membagi pengalaman memberikan dukungan secara terus menerus.

Demi menyempurnakan pelatihan para tokoh masyarakat dan agama, serta untuk memastikan keberlangsungan usaha pelatihan ini, para peserta dilibatkan dalam berbagai diskusi melalui jaringan nasional yang diadakan pemerintah. Mereka membentuk panitia daerah hak asasi manusia dan menjadikan tokoh agama sebagai bagian dalam perencanaan program hak asasi manusia, bersamaan dengan usaha memajukan hak asasi manusia dalam bidang pendidikan. Pada awalnya, ada 31 komite propinsi yang berjalan, termasuk tokoh agama dan masyarakat (khususnya guru dan dosen) yang terlibat dalam usaha memperkenalkan dan mendukung pendidikan, juga memajukan hak asasi manusia di lingkungan mereka. Tokoh-tokoh ini diharapkan dapat melatih para tokoh setempat.

Usaha mereka menciptakan pondasi yang baik dalam program pendidikan.

Proses ini akan membantu penyusunan kurikulum untuk pengajaran hak asasi manusia yang akan digunakan di semua tingkat, baik dalam sistem pendidikan nasional, institusi swasta, maupun dalam sektor pendidikan non-formal. Pemerintah daerah menyediakan dana untuk setiap komite propinsi daerah. Komite ini baru dibentuk pada tahun 2005. Tetapi saat ini mereka telah melatih pegawai PEMDA dan peserta pelatihan lainnya menggunakan buku panduan yang disediakan oleh POKJA. Mereka telah melatih guru-guru SD, SMP, dan SMA, juga tokoh-tokoh dari sektor non-formal. Panitia daerah memberikan laporan tahunan kepada komite pusat di Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia. Panitia pusat melihat kesenjangan antara rencana dan hasil yang dicapai. Pada awalnya, tidak ada rencana untuk mengadakan pelatihan lanjutan.

Memfaatkan sistem pendidikan yang terpusat untuk menyusun kurikulum untuk digunakan dalam pendidikan formal dan non-formal dengan dukungan tokoh masyarakat dan agama.

Terlepas dari kebijakan desentralisasi terhadap seluruh institusi pemerintah, dalam beberapa bidang, khususnya pendidikan, masih bersifat sentralistik. Bagan 3 menunjukkan ruang lingkup kerja POKJA bekerja sama dengan berbagai badan pemerintah (Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Hak Asasi Manusia, Departemen Pendidikan, dan Departemen Agama

Tabel 4
KURIKULUM HAM: INTEGRASI DALAM MATA KULIAH KEWARGANEGARAAN

Kompetensi dasar	Indikator	Materi Utama	Metode
Kemampuan menjelaskan kemerdekaan dasar manusia	Menjelaskan kemerdekaan dasar manusia	Def. HAM, ruang lingkup, sejarah HAM, teori, nilai, prinsip dasar, Instrumen HAM	Kuliah, diskusi, analisis referensi HAM, instrumen, dan resume
Kemampuan menjelaskan pentingnya HAM	Menyadari pentingnya HAM	Kasus pelanggaran HAM	Klasifikasi nilai, teknik, studi kasus, obeservasi, interviu
Kemampuan memajukan, melindungi, dan membela HAM	Kemampuan memajukan, melindungi, dan membela HAM	Taktik memajukan melindungi, dan membela HAM di tingkat nasional	Portofolio

Tabel 5

KURIKULUM HAM UNTUK MAHASISWA FAKULTAS HUKUM

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI UTAMA
Kemampuan menjelaskan kemerdekaan dasar manusia	Menganalisis kemerdekaan individu; menjelaskan kemerdekaan kolektivitas; menjelaskan HAM yang melekat kepada setiap orang	Kemerdekaan dasar manusia
Kemampuan menganalisis definisi dan prinsip dasar HAM	Memberikan definisi HAM; menganalisis istilah HAM; menjelaskan prinsip dasar	Definisi dan Prinsip dasar HAM
Kemampuan menjelaskan kemerdekaan dasar manusia	Menganalisis HAM dasar (DUHAM); menjelaskan kemerdekaan dasar manusia (DUHAM)	Hak dasar/kemerdekaan dasar manusia
Kemampuan menganalisis sejarah dan perkembangan HAM internasional	Menjelaskan Media Charter; Bill of Rights; Deklarasi Prancis; DUHAM	Sejarah dan perkembangan HAM
Kemampuan menjelaskan HAM dalam perspektif agama, budaya, dan politik	Menganalisis HAM (perspektif agama); memabdingkan HAM dengan relativitas budaya; membandingkan HAM dengan politik Intl.	HAM dalam perspektif agama, budaya, dan politik

tuk mengirim para tokoh ke pelatihan internasional yang akan diadakan di Jerman, Jepang, dan Mesir. Sekembalinya dari sana, mereka akan menjadi pelatih resmi hak asasi manusia dalam komunitas mereka.

Meskipun para tokoh agama berperan penting dalam pengembangan dan pelatihan kurikulum hak asasi manusia, mereka tidak diminta secara khusus untuk berpartisipasi dalam program sosialisasi. Tentu saja, dalam pernyataan publik, pemerintah Indonesia memilih untuk bersikap tidak merujuk secara langsung ke agama tertentu.

bersama dengan para akademisi) untuk memperkenalkan pendidikan hak asasi manusia ke dalam sistem pendidikan pemerintah maupun swasta.

POKJA berhasil mendapatkan dukungan dan kerja sama dengan Departemen Pendidikan yang memiliki hubungan

dengan para guru dan tokoh yang tersebar di negara ini; Departemen Agama yang memiliki hubungan dengan tokoh-tokoh agama yang bekerja di bawah departemen ini; dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang memiliki hubungan dengan akademisi dan tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama terkemuka.

Hasil dan Dampak Taktik

Empat ratus tokoh telah dilatih, termasuk tokoh masyarakat, agama, pegawai negeri sipil, akademisi, polisi dan anggota militer dari akademi kepolisian dan militer. Pelatihan sebelumnya diadakan di luar negeri seperti Kanada, Norwegia, Australia, Swedia, Afrika Selatan, Perancis, dan di dalam negeri. Selanjutnya, direncanakan pula un-

Sebagai bentuk nyata intervensi tokoh agama adalah ketika salah seorang dari mereka mengatakan bahwa akan lebih baik jika nilai-nilai hak asasi manusia dimasukkan ke dalam pelajaran agama dan kurikulum pelajaran agama, tetapi tidak menggunakan terminologi hak asasi manusia. Contohnya: tidak menggunakan istilah: hak hidup, tetapi mencari padanan dalam kebudayaan dan agama. Tambahan lagi, pembicaraan awal dengan para tokoh agama menghasilkan momentum untuk memasukkan nilai-nilai hak asasi manusia ke dalam wacana mereka.

Tindak lanjut dimasukkannya nilai-nilai hak asasi manusia ke dalam kurikulum adalah dengan memperkenalkan siswa dari berbagai tingkat baik formal maupun non-formal terhadap prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan: UU No. 39, 1999 tentang HAM, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Secara khusus, nilai-nilai ini telah diintegrasikan ke dalam kurikulum ilmu pengetahuan sosial dan agama di tingkat SD, kurikulum kewarganegaraan dan agama di tingkat SMP, kurikulum agama, geografi, sosiologi di tingkat SMA, dan ke dalam mata kuliah kewiraan dan agama di tingkat universitas. Sebagai tambahan, kurikulum hak asasi manusia telah dirancang bagi mahasiswa hukum. Totalnya, 1000 orang guru kewarganegaraan telah dilatih oleh Departemen Pendidikan untuk mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia. Para guru ini dilatih oleh para pelatih yang telah pergi ke luar negeri dan guru kewiraan senior lainnya yang telah mengikuti pelatihan TOT. (Lihat contoh kurikulum pada Bagan 4, 5, dan 6). 31 panitia hak asasi manusia tingkat propinsi telah dibentuk untuk mengadakan pelatihan dan memberi dukungan bagi para pelatih daerah.



“Hak dasar mereka terhadap pendidikan terabaikan.” – Dimuat di koran terkemuka Kompas (23 Juli, 2005)



Mashadi (kiri) memimpin lokakarya tentang Penyusunan Kurikulum HAM tingkat Universitas, Juli, 2004

Bersamaan dengan itu, sebuah buku panduan diterbitkan oleh para pelatih hak asasi manusia (sektor non-formal) sebagai pedoman bagi semua guru hak asasi manusia (tingkat dasar, menengah, negeri dan swasta). Pada tahap ini, dampak strategi ini mulai nampak di kalangan publik, media — seperti surat kabar — dan khususnya di antara para tokoh masyarakat. Kami percaya strategi ini telah meningkatkan kesadaran para tokoh dan mereka dapat melihat relevansi antara nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai tradisional, dan kemanusiaan. Contohnya, sejumlah tokoh agama di Indonesia menjadi pembicara dalam acara televisi dan radio membahas mengenai aspek-aspek dalam Islam, dari filosofi sampai hukum. Seorang tokoh agama yang sangat terkenal juga pemandu acara televisi, A.A. Gym contohnya. Ia mempunyai stasiun televisi dan radio, memproduksi rekaman dan vcd, juga memandu acara harian di televisi dan siaran radio yang disebut sebagai acara interaktif. Ia cukup disukai masyarakat. Dalam dua tahun terakhir, ceramah A.A. Gym lebih menekankan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan seperti yang lainnya, kini ia juga menggunakan istilah hak asasi manusia dan mengeritik kekerasan di Indonesia dan luar negeri. Meskipun A.A. Gym tidak terlibat secara langsung dalam POKJA, perwakilan dari organisasinya telah diutus ke lokakarya. Ditambah lagi, referensinya terhadap hak asasi manusia telah menghadirkan iklim baru di Indonesia. Sebuah contoh pengintegrasian gagasan hak asasi manusia ke dalam wacana publik adalah yang dibuat sebelum invasi Amerika ke Irak. A.A. Gym menggendong seorang anak dan bersama sejumlah pengikutnya pergi ke Kedutaan Besar Amerika. Ia menyerahkan surat permintaan agar Amerika tidak menginvasi Irak. Ia menyatakan agresi itu akan membunuh wanita dan anak-anak, dan yang terutama, tindakan itu akan melanggar hak asasi manusia. Ini tentu saja merupakan istilah dan pendekatan baru yang dilakukan oleh tokoh ini. Dengan demikian, kami terdorong untuk melihat bahwa hak asasi manusia telah dipahami dan dapat mempengaruhi orang-orang yang berkata bahwa mereka juga memajukan hak asasi manusia.

Hal lebih sulit dievaluasi adalah dampak kurikulum hak asasi manusia pada siswa dari berbagai tingkat. Wacana para siswa, demonstran, khususnya kalangan mahasiswa, pada umumnya merujuk kepada pelanggaran hak asasi manusia. Saat ini kurikulum untuk berbagai kelompok usia disusun dalam bentuk ceramah dengan bahan bacaan dan permainan peran. Beberapa aspek juga diajarkan untuk menolong siswa memahami bagaimana cara mengaplikasikan gagasan ini ke dalam kehidupan nyata. Contohnya, mereka diajarkan tentang bagaimana mengajukan keberatan atas dasar hak asasi manusia, dan badan-badan yang bergerak dalam bidang pelanggaran hak asasi manusia (seperti kekerasan polisi, diskriminasi, kekerasan dalam rumah tangga, isu perumahan, dan tanah, dll.)

PELAJARAN YANG DIPELAJARI

Kami telah memanfaatkan pengetahuan para tokoh masyarakat mengenai komunitasnya untuk membuat kurikulum yang konsisten terhadap nilai-nilai kebudayaan dan agama. Melalui proses itu, kami telah memahami bahwa kami tidak hanya harus memadukan semua saran dalam pengembangan kurikulum, dan juga harus melakukan dialog secara terus menerus melalui pelatihan. Karena pendapat mereka dihargai dan diikuti oleh komunitasnya, maka dialog tambahan dan pelatihan akan memiliki dampak yang berkesinambungan. POKJA akan mengerjakan tugas yang sangat ambisius di tingkat nasional, dan kini kami menyadari bahwa pelatihan para tokoh masyarakat Indonesia akan membutuhkan waktu yang sangat lama dari suatu usaha yang berkelanjutan.

Bahkan kami yakin bahwa taktik yang memanfaatkan tokoh masyarakat sangat efektif. Menyebarluaskan hak-hak Asasi Manusia dalam pendidikan merupakan pendekatan yang terbaik selama sistem pendidikan terpusat. Dan pendekatan yang lain adalah kami menggunakan tokoh masyarakat untuk mencapai tujuan kami. Mereka terdiri atas akademisi, guru, tokoh masyarakat baik formal maupun non-formal, dan kepala sekolah. Kami tidak hanya memperoleh dukungan yang lebih besar untuk mendiseminasikan nilai-nilai HAM tetapi juga melakukan dialog tentang HAM dengan mereka.



Pelatihan TOT untuk Tokoh Masyarakat, agama, serta tokoh lainnya di Jakarta, Mei, 2003.

Akhirnya kami menyadari bahwa akan lebih efektif untuk memulai dari proyek percontohan, dana, kompetensi, dan klien dalam satu daerah. Sehingga kami dapat berhubungan dengan tokoh masyarakat di tingkat daerah. Dan kami juga dapat menggunakan umpan balik mereka untuk mencapai tujuan kami.

Untuk meningkatkan hasil kerja kami dalam penyosialisasian nilai-nilai HAM pada tingkat perguruan tinggi, kami mendiskusikan konsep-konsep HAM di kalangan masyarakat, individu, dan tokoh. Akhirnya, kami perlu mengadopsi Deklarasi Internasional mengenai HAM.

TANTANGAN YANG TERUS BERLANJUT

Menjalankan program POKJA, kami membutuhkan banyak referensi tentang HAM dan kami perlu menulis buku tentang terminologi dan konsep-konsep HAM untuk setiap guru dan pelatih di Indonesia. Kami perlu mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam kurikulum dan meminta tokoh masyarakat dan agama untuk mendiseminasikannya. Nilai-nilai HAM perlu didefinisikan secara jelas, sehingga guru agama akan mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Karena itu kami perlu menyiapkan pelatihan dan seminar bagi guru-guru agama.

Gambaran kompetensi dasar yang diharapkan dari siswa perlu dikembangkan lebih jauh. Karena kurikulum berbasis kompetensi perlu diterapkan di Indonesia, kompetensi mengenai HAM perlu dibuat secara eksplisit agar dapat dimengerti. (lihat bagan 4 dan 5 sebagai contoh kurikulum).

Kompetensi dan konsep nilai-nilai HAM saat itu tidak sesuai dengan kurikulum. Namun waktu yang disediakan oleh Departemen Hukum dan HAM untuk menulis kurikulum itu sangat sedikit. Penekanan utama dilakukan pada proses konsultasi yang tentunya sangat penting dan mendesak betul; Namun waktu yang cukup diperlukan untuk merevisi isi kurikulum berdasarkan konsultasi itu.

Karena terbatasnya dana dan pemanfaatan otonomi daerah, panitia lokal (termasuk tokoh masyarakat, agama, dan selainnya) bertanggung jawab untuk memajukan HAM, pendidikan dan pelatihan HAM bagi para pendidik di wilayah mereka masing-masing. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, panitia ini dibentuk tahun 2005, sehingga hasilnya belum dapat dilihat. Data rinci akan dikumpulkan pada tahun 2006. Evaluasi jangka panjang akan dilakukan pada tahun 2006 oleh para ahli pendidikan dari Departemen Pendidikan Nasional dalam hal ini Universitas Negeri Jakarta. Rencana ini adalah untuk mengukur dampak implementasi kurikulum baru dalam bidang pengetahuan, sikap, dan perilaku.

REKOMENDASI PENERAPAN TAKTIK INI

Berdasarkan pengalaman kami di POKJA, keberhasilan menyebarluaskan nilai-nilai HAM membutuhkan

konsultasi dan pendapat tokoh masyarakat sebanyak mungkin di segala bidang melalui dialog terbuka. Faktor terpenting adalah memastikan partisipasi aktif pemerintah dalam memperkenalkan HAM. Memperhatikan arus informasi yang stabil dan berkoordinasi dengan segala cabang pemerintahan dalam proses sosialisasi harus ditekankan. Penggunaan taktik kami di lingkungan pendidikan juga menuntut kami melatih mereka yang terlibat dalam penulisan kurikulum dan buku ajar, selama perangkat ini nantinya akan digunakan sebagai referensi. Hal ini merupakan hal yang sangat penting bagi orang lain untuk diperhatikan.

Bersamaan dengan itu kampanye media yang gencar (TV, radio, koran) akan menjadi efektif untuk menyatukan nilai-nilai budaya, agama dan HAM. Tujuannya untuk melahirkan wacana populer pada tradisi, agama, dan HAM di seluruh masyarakat. Walaupun kami tidak menggunakan metode ini dalam kasus kami, kami yakin bahwa metode ini merupakan pilihan yang tepat.

Tokoh masyarakat harus dilibatkan dalam semua jenjang, termasuk POKJA itu sendiri, pada tahap implementasi dan seterusnya. Mereka harus mampu tetap berhubungan melalui jaringan kerja di mana mereka dapat mendiskusikan pandangan dan usaha sukses mereka dalam memperkenalkan HAM di masyarakat mereka.

Kesinambungannya akan dipastikan melalui pembentukan komite HAM yang bersifat multibudaya, multi-etnis, dan multi-agama di lingkungan masyarakat tentang HAM. Cara ini telah dilaksanakan di Indonesia melalui LSM yang bersifat multietnis, multi-budaya, dan antar penganut umat beragama. Kesimpulannya, pembentukan kelompok yang anggotanya bersifat heterogen untuk membicarakan dan mengimplementasikan HAM akan membantu penerapan HAM di Indonesia dan mungkin akan sangat membantu dunia lainnya untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

Sejumlah faktor perlu dipertimbangkan sebelum mengimplementasikan taktik yang serupa.¹⁰Pertama, analisis lengkap mengenai konteks sosial merupakan kunci sukses taktik ini. Tokoh masyarakat perlu diidentifikasi secara jelas, dan hubungan antara HAM dan budaya lokal perlu dijelaskan secara rinci untuk merelevansikan konsep HAM dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Yang terakhir adalah perlunya memastikan tingkat komitmen berbagai cabang pemerintahan. Hal ini harus dinilai, dianalisis, dikembangkan, dan dikonsolidasikan.

KETERBATASAN TAKTIK

Taktik ini memiliki keterbatasan-keterbatasan jika ditinjau dari berbagai sudut pandang. Sesungguhnya keinginan politik yang tinggi dan atmosfer yang sesuai dalam tubuh pemerintahan membantu suksesnya keberhasilan taktik ini di Indonesia. Untungnya faktor ini ada di Indonesia dan membuat pengimplementasian

program sosialisasi HAM dapat terlaksana. Di negara lain mungkin sulit dilakukan karena tidak adanya dukungan dari pemerintah atau karena pemerintah bersifat resisten terhadap pengenalan nilai-nilai HAM.

Sebagai tambahan, taktik ini telah membuat meluasnya penggunaan kurikulum HAM dan mendapat manfaat yang besar dari sistem pendidikan yang tersentralisasi di Indonesia yang memungkinkan kurikulum dapat diterapkan baik pada sekolah negeri maupun swasta. Sentralisasi ini merupakan aset besar bagi Indonesia, tetapi sistem seperti ini mungkin tidak berlaku di negara lain dimana kurikulum dikembangkan dan diimplementasikan oleh tiap-tiap lembaga. Taktik kami juga sangat bergantung pada penghargaan mayoritas penduduk terhadap pemuka agama dan tokoh masyarakat.

Pada akhirnya, di antara keterbatasan-keterbatasannya adalah taktik ini sulit diterapkan di negara dengan mayoritas yang kurang homogen (baik budaya, etnis, maupun agama).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, variasi taktik telah digunakan di Indonesia di waktu lampau untuk mengimplementasikan Keluarga Berencana. Pada saat itu pemuka agama di seluruh Indonesia ditugaskan di seluruh Indonesia untuk mendiskusikannya dengan anggota masyarakat mengenai relevansi keluarga berencana dengan ajaran Islam. Hasilnya positif karena kebanyakan bangsa Indonesia memahami dan secara sukarela menggunakan alat kontrasepsi saat ini. Mereka percaya manfaat yang mereka peroleh untuk kesejahteraan keluarga mereka. Namun, pada saat yang sama ada pula cara-cara pemaksaan oleh agen pemerintah di daerah agar target mereka dapat tercapai sehingga mereka bisa mendapatkan imbalan berupa uang. Di bawah pemerintahan baru yang lebih demokratis dan karena kebebasan berbicara di Indonesia saat ini lebih terjamin, faktor ketakutan untuk menerima konsep-konsep baru relatif tidak terjadi.

Hasil dari pengalaman dengan kebijakan Keluarga Berencana, POKJA membuat perubahan yang signifikan dengan proses sosialisasi HAM. Tidak ada pemuka agama dipekerjakan, walaupun mereka banyak dilibatkan dalam proses dan penerapan program. Karena banyaknya jumlah dosen di Universitas Islam memainkan peran ganda sebagai pemuka agama, berceramah di masjid-masjid dan memimpin kelompok diskusi agama secara teratur, mereka menduduki posisi kunci dalam keberhasilan penerapan program. Namun, karena mereka tidak direkrut oleh pemerintah, maka konflik kepentingan kurang terdengar dan oleh sebab itu mereka tetap dipatuhi oleh pengikutnya.

Taktik ini memiliki potensi besar untuk digunakan pada situasi lain hal mana konsep-konsep baru akan sangat mudah diterima jika disampaikan oleh tokoh yang mereka kenal, memahami nilai-nilai budaya mereka dan kepentingannya. Khusus pada konteks

Indonesia, faktanya adalah bahwa populasi umat beragama sangat homogen. Namun penting pula dicatat bahwa di Indonesia terdapat pandangan dan praktek keagamaan yang sama di sejumlah penduduk muslim. masyarakat Indonesia sangat bergantung pada tradisi yang sudah mengakar selama berabad-abad dan masih tetap hidup, dan masih sangat tergantung pada pemimpin yang mereka percaya. Hal ini tidak jauh berbeda dengan negara dan masyarakat di belahan dunia lainnya.

Untuk memperoleh kebermaknaan dan kekuatan taktik ini, kunci utamanya adalah memahami latar belakang politik dan sosial keagamaan suatu negara. Bagi kami di Indonesia, faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah kebanyakan masyarakat Indonesia tinggal di desa. Kehidupan mereka sangat terjal dengan baik. Pemuka agama dan tokoh masyarakat memainkan peran yang sangat aktif dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan, dukungan, dan bimbingan dari tokoh mereka didengar oleh masyarakatnya. Hal ini mungkin tidak berlaku pada negara-negara yang terlibat dalam perang dan konflik internal yang berkepanjangan. Dalam kasus seperti itu mungkin sangat sulit untuk mengidentifikasi pemuka agama dan tokoh masyarakat di luar jaringan politik yang dapat meredam konflik. Pada saat yang sama, masyarakat umumnya menemukan cara-cara untuk mencari pemimpin yang mereka hargai. Mencari pemimpin yang dipercayai memerlukan waktu yang cukup lama dan yang dapat berperan sebagai pemimpin yang terpercaya.

Kerja sama yang kuat dan terus menerus antara POKJA dan seluruh lapisan masyarakat, dan tokoh agama memungkinkan terintegrasinya nilai-nilai HAM ke dalam kurikulum nasional di Indonesia. Hal ini memfasilitasi dan memajukan sosialisasi nilai-nilai HAM secara konkret kepada masyarakat umum. Karena pemuka agama dan tokoh masyarakat telah dilatih di luar negeri dan di tanah air, mereka telah memperoleh pandangan luas mengenai HAM yang membuatnya mampu menerjemahkan nilai-nilai HAM tersebut guna pendidikan masyarakat. Pendekatan seperti ini terbukti sangat efektif untuk memperoleh dukungan dari para tokoh ini yang peran dan kredibilitasnya masih sangat dihargai oleh masyarakat.

SIMPULAN

Pertimbangan lain mengenai taktik ini adalah perlunya dibuat penyesuaian-penyesuaian dengan realitas sistem dan lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta. Perlu pula dipahami tingkat dukungan pemerintah, nilai-nilai lokal, dan kepercayaan masyarakat. Juga keuntungan dan kerugian melibatkan tokoh agama dan masyarakat ke dalam proses sosialisasi HAM.

Akhirnya, saya berharap bahwa contoh yang kami utarakan untuk membudayakan sosialisasi HAM dengan mempertimbangkan konteks politik, budaya, dan agama di Indonesia akan bermanfaat bagi orang

lain yang sedang mencari ide bagi strategi pendidikan HAM yang lebih luas. Bagi kami, kemampuan untuk memperoleh dukungan dan pengaruh pemuka agama dan tokoh masyarakat memungkinkan tersusunnya kurikulum HAM yang lebih baik bagi sistem pendidikan formal dan non formal dan membuatnya lebih dapat diterima dan seirama dengan nilai-nilai budaya masyarakat dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

1 Laporan Negara tentang Praktek HAM - 2004, Dikeluarkan oleh Biro Demokrasi, HAM, dan Perburuhan, 28 Februari, 2005. U.S. Department of State. Sumber: <http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41643.htm>. Diambil pada tanggal 13 November, 2005.

2 Laporan Negara tentang Praktek HAM - 2004, Dikeluarkan oleh Biro Demokrasi, HAM, dan Perburuhan, 28 Februari, 2005. U.S. Department of State. Sumber: <http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41643.htm>. Diambil pada tanggal 13 November, 2005.

3 Laporan Negara tentang Praktek HAM - 2004, Dikeluarkan oleh Biro Demokrasi, HAM, dan Perburuhan, 28 Februari, 2005. U.S. Department of State. Sumber: <http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41643.htm>. Diambil pada tanggal 13 November, 2005.

4 Muslim Ahmadiyya ditemukan oleh Ghulam Ahmed, tahun 1889, pemenuhan harapan Messiah Kristen, Yahudi Islam dan agama lain.

5 Sumber: <http://www.ham.go.id/ran.asp>. Diambil November 13, 2005.

6 Kyai: Cendekiawan Muslim atau Pemimpin Pesantren.

7 Ulama: Cendekiawan Muslim yang menginterpretasikan sains dan doktrin, serta hukum Islam, dan Pewaris atas Keberlangsungan Islam.

8 Pesantren: sekolah islam yang menyiapkan asrama bagi strinya dan dipimpin oleh seorang Kyai.

9 Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: www.kompas/kompas-cetak/0112/21/UTAMA/kedu01.htm Di ambil pada tanggal 2 December 2, 2005.

10 Untuk contoh tambahan mengenai tokoh agama, lihat buku taktik: Persuasi Handal (<http://www.newtactics.org/main.php/PowerfulPersuasion>)

Untuk mencetak atau mengunduh publikasi ini dan publikasi lainnya dalam serial buku catatan taktik, silakan kunjungi <http://www.newtactics.org>
Jika Anda mengunjungi alamat di atas, Anda juga dapat menemukan kumpulan data mengenai taktik, forum untuk berdiskusi dengan para praktisi HAM lainnya dan berbagai piranti dan sumber daya lainnya untuk mengaplikasikan pemikiran strategis dan taktiks.



Pusat Korban Penganiayaan

Taktik Baru dalam Proyek HAM

717 East River Road

Minneapolis, MN 55455 USA

www.cvt.org, www.newtactics.org

